



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR N.100.B2.TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR K.763.B2 TAHUN 2025 TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**TAHUN 2026**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir penambahan usulan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Bengkulu dari Perangkat Daerah yang tidak termasuk di dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.763.B2 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Bengkulu Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Juncto Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Bengkulu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor K.763.B2 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Bengkulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

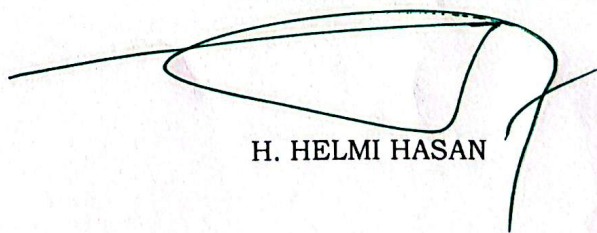
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 90);
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.763.B2 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Gubernur Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai jadwal dan berdasarkan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 25-07-2025  
GUBERNUR BENGKULU,



H. HELMI HASAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR N. 100. B2, TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR K.763.B2 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2026

| NO | INSTANSI PEMRAKARSA                                                                                                         | TENTANG                                                                                                        | MATERI POKOK                                                                                                                                                                           | STATUS |      | PELAKSANAAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | BARU   | UBAH |             |                    |
| 1  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu. | Grand Design Pembangunan Kependudukan.                                                                         | Arah Kebijakan dan Pedoman Penyelesaian Laju Pertumbuhan Penduduk yang Efektif dan terukur untuk mewujudkan Pembangunan Kependudukan.                                                  | ✓      |      | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Pedoman Pelaksanaan Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)                                      | Pedoman Pelaksanaan Percepatan Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                    | ✓      |      | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu                                              | Memberikan acuan bagi aparaturnya daerah dalam menyusun strategi penintrasian gender, mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bangsa dan negara. | ✓      |      | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | ✓      |      |             |                    |
| 2  | Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)                                                                                           | Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu | Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu                                                                         |        | ✓    | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Pedoman Penghitungan NPAP dan Tata Cara Perhitungan Pembayaran dan Pengawasan PAP                              | Penetapan HDAP serta Pedoman Penghitungan NPAP dan Tata Cara Perhitungan Pembayaran dan Pengawasan PAP                                                                                 |        | ✓    | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Tata cara Penagihan Pajak Daerah                                                                               | Prosedur Penagihan Pajak Daerah dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksaan, Penyitaan hingga Penjualan Barang Sitaan.                                                        | ✓      |      | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah                                                                             | Alur Pemeriksaan Pajak Daerah                                                                                                                                                          | ✓      |      | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                    |
|    |                                                                                                                             | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                 | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                                         |        | ✓    | 2026        | 2026               |
|    |                                                                                                                             | Petunjuk Pelaksanaan                                                                                           | Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB-KB                                                                                                                                                 |        | ✓    | 2026        | 2026               |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |      |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|   |                                                          | Pemungutan PBB-KB                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |      |
|   |                                                          | Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu                                                                                                                                                                       | Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |                                                          | Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penetapan Status Objek Pajak Non-Efektif Sementara dan Peningkatan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.                                                                                 | Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penetapan Status Objek Pajak Non-Efektif Sementara dan Peningkatan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |                                                          | Nilai Jual Kendaraan Bermotor.                                                                                                                                                                                                                     | Nilai Jual Kendaraan Bermotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ | 2026 | 2026 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Bengkulu | Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.                                                                                                                                                       | Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ✓    | 2026 |
| 4 | Biro PBJ dan Administrasi Pembangunan                    | Analisis Standar Belanja                                                                                                                                                                                                                           | Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | 2026 | 2026 |
| 5 | Dinas Kesehatan                                          | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus                                                                       | 1. Pola Tata Kelola Keuangan.<br>2. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA.<br>3. Pelaksanaan Anggaran.<br>4. Tata Cara Penghapusan Piutang.<br>5. Tata Cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek.<br>6. Pengelolaan Investasi.<br>7. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kebijakan Akuntansi.<br>8. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian.<br>9. Laporan Pengelolaan Barang RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.<br>10. Pengelolaan Aset. |   | ✓    | 2026 |
|   |                                                          | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang di daftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. | 1. Persyaratan Peserta.<br>2. Kriteria Peserta.<br>3. Mekanisme Pendaftaran Peserta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | ✓    | 2026 |
|   |                                                          | Standar Pelayanan Minimal (SPM)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ✓    | 2026 |
|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |      |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |   |      |      |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|   |             | RSUD dr.M.Yunus Bengkulu                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |   |      |      |
|   |             | Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal RSUD dr.M.Yunus Bengkulu                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu | Perubahan Tarif                                                                                                                                         | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | ✓ |      |      |
| 6 | Inspektorat | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                                                                                                        | Perubahan Pedoman Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                          | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Inspektorat                                                                                                                                                                                  | Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Inspektorat (Audit, Review, Evaluasi, dan Monitoring)                                                             | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Tindak Lanjut atas Hasil Temuan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                                                                                | Pemeriksaan APIP dan Eksternal                                                                                                                          | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Probiti Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu               | Pedoman Pelaksanaan Probiti Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Kendali Mutu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                                                                 | Kendali Mutu Pembinaan dan Pengawasan                                                                                                                   | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                                                                   | Pedoman Pembuatan Dokumen Perencanaan, Pengukuran Pelaporan dan Evaluasi SAKIP                                                                          | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             | Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                                                                                                                | Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kewajiban Penyelenggara Negara dan/ ASN dan Pegawai Provinsi Bengkulu dan Kategori Gratifikasi, Unit                  | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |   |      |      |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |   |   |      |      |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    | Pengendali Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Penanganan Laporan Gratifikasi dan Laporan Hasil, Penanganan oleh UPG, Penetapan Status Barang Gratifikasi, Penyerahan Barang Gratifikasi, Perlindungan dan saksi              |   |   |      |      |
|   |                                                   | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                              | Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                               |   | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |                                                   | Penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan                                                                                                                                                                        | Mengganti Pergub No 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara penanganan pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu                                 | ✓ |   | 2026 | 2026 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu | Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan                                          | Kebijakan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | ✓ |   | 2026 | 2026 |
|   |                                                   | Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu | Penghapusan SMK Negeri 6 Bengkulu Selatan                                                                                                                                                                                     |   | ✓ | 2026 | 2026 |
| 8 | Dinas Pariwisata                                  | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |   | ✓ | 2026 | 2026 |
| 9 | Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu           | Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah                                                                                                                                                  | PP 18 tahun 2016                                                                                                                                                                                                              |   | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |                                                   | Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD dan cabang dinas.                                                                                                                                            | PP 18 tahun 2016                                                                                                                                                                                                              |   | ✓ | 2026 | 2026 |
|   |                                                   | Standart kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.                                                                                                                                                            | Tindak Lanjut Peraturan Menpan RI No 38 tahun 2017                                                                                                                                                                            | ✓ |   | 2026 | 2026 |
|   |                                                   | Kelas Jabatan di Lingkungan                                                                                                                                                                                                        | Surat Menpan Hasil Validasi Kelas Jabatan                                                                                                                                                                                     |   | ✓ | 2026 | 2026 |

|    |                                        |                                                                                        |                                                                                                 |   |   |      |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
|    |                                        | Pemerintah Provinsi Bengkulu.                                                          |                                                                                                 |   |   |      |
|    |                                        | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. | Kepmendagri tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. |   | ✓ | 2026 |
|    |                                        | Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2029.                                                | Tindak Lanjut Peraturan Menpan RI No 6 tahun 2025.                                              | ✓ |   | 2026 |
| 10 | Badan Keuangan dan Aset Daerah         | Penjabaran APBD TA 2027                                                                |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Penjabaran Perubahan APBD TA 2026                                                      |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Standar Harga Satuan (SHS) TA 2027                                                     |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Bantuan Keuangan                                                                       |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | THR Tahun Anggaran 2026                                                                |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Gaji 13 Tahun Anggaran 2026                                                            |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) TA 2026.                                          |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |
|    |                                        | Standar Satuan Harga Barang dan Jasa                                                   |                                                                                                 | ✓ |   |      |
|    |                                        | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025                                 |                                                                                                 | ✓ |   |      |
|    |                                        | Buku II Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua                                             |                                                                                                 | ✓ |   |      |
|    |                                        | Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah                                        |                                                                                                 | ✓ |   |      |
|    |                                        |                                                                                        |                                                                                                 |   |   |      |
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu.                                         |                                                                                                 | ✓ |   | 2026 |

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN